

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tahun 2013- 2018 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain : (i) Adanya Penyelarasan penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No. 1 Tahun 2018; (ii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut; (iii) keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Dinas yang akan dilaksanakan dalam sisa periode 1 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2018 menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya, penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJP Daerah tahun 2008 – 2028 dan Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2013-2018, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra SOPD sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra SOPD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
 20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan adalah :

1. Sebagai Landasan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
2. Agar seluruh kegiatan dapat terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3. Agar kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya selama

kurun waktu 2013 -2018 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENSTRA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 **Latar Belakang**, mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, Fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA SKPD, keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/Kota dan dengan RENJA SKPD.
- 1.2 **Landasan Hukum**, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 **Maksud dan Tujuan**, berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA SKPD.
- 1.4 **Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 1.1 **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
- 1.2 **Sumber Daya SKPD**, menguraikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1.3 Kinerja Pelayanan SKPD, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target RENSTRA SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,

3.3 Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

4.2 Strategi dan Kebijakan, berisi tentang strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan RENSTRA-SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

2.1 Tugas, Fungsi Struktur dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

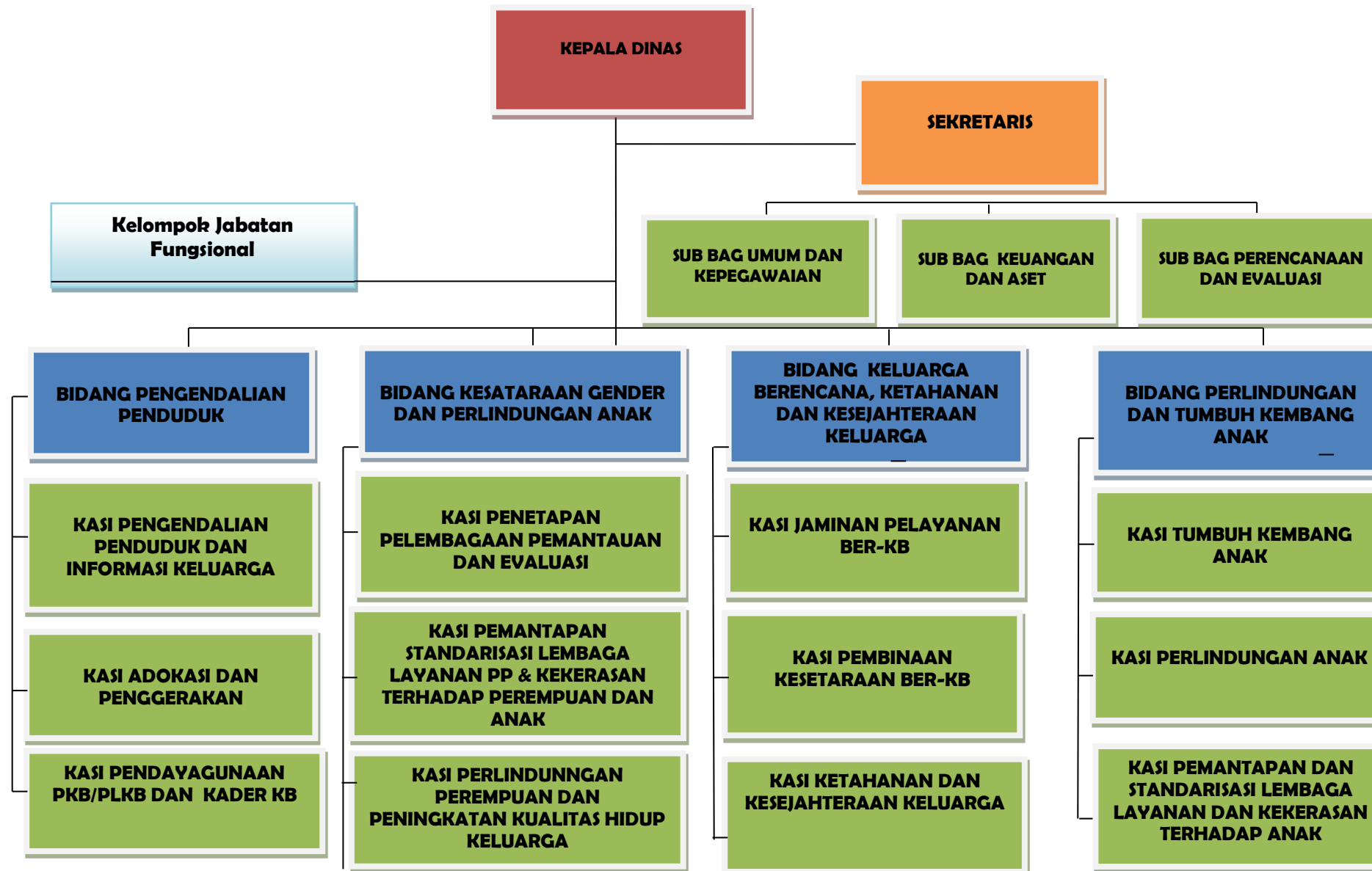
- a. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 15 (dua belas) Sub Bidang, dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahkan ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Informasi Keluarga
 - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang membawahkan :
 - a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB
 - b. Seksi Pembinaan Kesetaraan Ber-KB; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, yang membawahkan :
 - a. Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengarusatamaan Gender (PUG);
 - b. Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Pelayanan PP dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
6. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, yang membawahkan :
 - a. Seksi tumbuh Kembang Anak;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan dan Kekerasan Terhadap Anak.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA



2.2 Sumber Daya SKPD

Terdapat 3 (tiga) lingkungan internal yang terindikasi sebagai faktor berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, dalam menunjang kinerja organisasi agar optimal maka kondisi personalia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan		
1.	SD/MI	-
2.	SMP/MTs	-
3.	SMA/MA/SMK	16
4.	D-1	-
5.	D-2	-
6.	D-3	5
7.	D-4	-
8.	S-1	36
9.	S-2	7
10	S-3	-
Jumlah		64

Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan		
1.	SD/MI	-
2.	SMP/MTs	-
3.	SMA/MA/SMK	7
5.	D-1	-
6.	D-2	-
7.	D-3	10
8.	D-4	-
9.	S-1	8
10	S-2	-
11	S-3	-
Jumlah.		25

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional dan Pelaksana													
No	Eselon/ Pelaksana	Jenis Pendidikan											Jumlah
		SD / MI	SMP / MTs	SMA/ MA	SM K	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5
3.	Eselon IV	-	-	3	-	-	-	1	-	9	2	-	15
4.	Fungsional	-	-	13	-	-	-	4	-	23	3	-	43
Jumlah		-	-	16	-	-	-	5		36	7	-	64

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang :		
1.	IV/c	1
2.	IV/b	2
3.	IV/a	5
4.	III/d	22
5.	III/c	8
6.	III/b	11
7.	III/a	11
8.	II/d	4
9.	II/c	-
Jumlah		64

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang memiliki atau digunakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya pada umumnya memadai. Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, antara lain meliputi :

1. Bangunan Kantor saat ini menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Palangka Raya, dimana merupakan kantor yang pernah digunakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya.
2. Kendaraan Dinas
 - a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 1 Unit
 - b. Bus (MUPEN, MUYAN dan MOLIN) : 3 Unit
 - c. Kendaraan Dinas Roda 2 : 30 Unit

3. Peralatan Kantor berupa :

Meja Kerja	Laptop	Brangkas
Kursi Kerja	Mesin Tik	Sound System
Kursi Tamu	AC	Telepon
Lemari Arsip	Camera digital	Note Book
Filling Cabinet	Mesin Absen	Printer
Komputer	Mesin Potong Rumput	Kalkulator
LCD	Lemari Es	Dsb

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pada lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan namun masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kondisi masyarakat di Kelurahan saat ini belum banyak yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan pembangunan, belum optimal dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, juga belum mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan pembangunan. Masyarakat masih bersifat pasif dan menunggu program dan kegiatan yang bersifat top down dari Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kapasitas lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan tingkat kelurahan. Beberapa indikator kegiatan penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak meliputi :

1. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Keluarga Berkualitas melalui Menghimpun dan Menyusun Data Terpilah
2. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan, Kecamatan dan Klinik KB
3. Pembinaan Kampung KB
4. Pembinaan dan pengembangan P2TP2A;
5. Meningkatnya sistem perencanaan dengan terselenggarakannya temu koordinasi /konsultasi/work shop/advokasi program pemberdayaan perempuan /mengikuti kegiatan harganas PKK-KB kesehatan (pusat dan daerah);

6. Terbentuknya Tempat Penitipan anak
7. Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI);
8. Pengembangan kota layak anak (KLA);
9. Meningkatnya peran serta kader dalam Kegiatan Pelatihan berbasis aktivis/kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
10. Sosialisasi Kelurahan Ramah anak menjadi Kota Layak anak
11. Terselenggaranya dan pelayanan KB secara terpadu dengan institusi terkait, (momentum TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK-KB Kes, KB-KES-IBI, KB Kes Bhayangkara)
12. Meningkatnya dan Pembinaan Program KB pada penyuluh KB dan Kampung KB
13. Sosialisasi pemantapan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi JKK Tingkat Kota Palangka Raya
14. Pembinaan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
15. Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular seksual pada remaja dalam rangka bulan peduli Kespro
16. Pembinaan Kader institusi masyarakat pedesaan (Kelompok BKB,BKR,BKL,PPKBD dan sub PPKBD);
17. Pembinaan melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
18. Pembinaan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sejahtera (P2W-KSS)
19. Peningkatan Tim Penggerak PKK
20. Pembinaan dan Koordinasi Pokjanal Posyandu
21. Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
22. Advokasi dan penguatan kelembagaan PUG
23. Peranan Posyandu
24. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
25. Pendidikan dan Keterampilan
26. Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan
27. Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan
28. Pembinaan Organisasi Wanita dalam Kegiatan Peningkatan Hari Ibu
29. Pembinaan terhadap perempuan/Keluarga Miskin
30. Mengikuti Pameran Perempuan Wira Usaha (Perwira) Usulan Prov APBN 2018

31. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Ketenagakerjaan (Usulan Prov APBD 2018)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Palangka Raya meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan formal dan diklat;
2. Tersedianya sarana pengembangan kota layak anak (KLA) dilanjutkan dengan pembinaan Kota Layak Anak;
3. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui Monitoring dan Evaluasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Klinik KB
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengolah data dan informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)

Kajian Teori

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat). Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT. Pendekatan ini memikirkan kekuatan apa saja yang kita miliki kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau instansi kita melihat kesempatan yang terbuka bagi kita mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang didepan kita, yaitu:

a. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns dalam BPS (tanpa tahun:1) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah

faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan.

<div><div>EKSTERNAL</div><div>INTERNAL</div></div>	OPPORTUNITY	TREATHS
STRANGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment / Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Keterangan:

- 1) Sel A: *Comparative Advantages*
Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
- 2) Sel B: *Mobilization*
Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
- 3) Sel C: *Divestment / Investment*
Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
- 4) Sel D: *Damage Control*
Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang

salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *damage control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan

Dalam penelaahan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi organisasi.

Hasil analisis SWOT terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a) Peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- b) Adanya Regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur Kewenangan, Tupoksi dan Kinerja pelayanan;
- c) Komitmen pemimpin daerah cukup tinggi terhadap pemberdayaan perempuan,, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d) Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang;
- e) Dukungan program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Penduduk, kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemberdayaan yang terbatas;
- b) Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai;
- c) Pendanaan dalam APBD kurang memadai;
- d) Penguasaan IT oleh sumber daya aparatur yang masih kurang
- e) Sarana IT daerah yang belum berfungsi secara maksimal
- f) Penyediaan pembiayaan gedung dan peralatan yang masih kurang

- g) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut ber- KB (khususnya pria)
- h) Masih kurangnya informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga
- i) Masih kurangnya pemuktahiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga
- j) Masih kurangnya pelatihan kader posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu-PAUD
- k) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader BKB trampil dalam memahami tehnik pembinaan
- l) Masih kurangnya kemampuan bakat dan keterampilan ibu balita yang punya usaha dalam manambah penghasilan keluarga melalui UPPKS

b. Analisis Lingkungan External

1. Kesempatan (Opportunity)

- a) Letak geografis yang strategis, menempatkan posisi Kota Palangka Raya menjadi ibukota provinsi;
- b) Adanya kesempatan untuk melakukan mitra kerja dengan kelembagaan pusat, daerah dan organisasi terkait.
- c) Adanya berbagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga dalam program pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana.

2. Ancaman (*Threats*)

- a) Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan;
- b) Lunturnya nilai-nilai adat dan budaya karena pengaruh teknologi informasi dan modernisasi;
- c) Rendahnya Komitmen SKPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM
- d) Masih tingginya tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

**Matrik Analisis SWOT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya**

<div> <div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div> </div>	OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)
	1. Letak geografis yang strategis, menempatkan posisi Kota Palangka Raya menjadi Ibukota Provinsi 2. Adanya kesempatan untuk melakukan mitra kerja dengan kelembagaan pusat, daerah dan organisasi terkait. 3. Adanya berbagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga dalam Program Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana.	1. Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sumber daya aparatur penyelenggara pemerintah 2. Lunturnya nilai-nilai adat dan budaya karena pengaruh teknologi infomasi dan modernisasi 3. Rendahnya Komitmen SOPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM 4. Masih tingginya tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
STRENGTHS (KEKUATAN)	STRATEGI SO	STRATEGI ST
1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung 2. Regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan, Tupoksi dan Kinerja Pelayanan 3. Komitmen pimpinan daerah cukup tinggi terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 4. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara bidang 5. Dukungan program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian penduduk, kesetaraan gender, perlindungan anak dan	1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung dan Regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan, Tupoksi dan Kinerja Pelayanan. 2. Komitmen pimpinan daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana guna peningkatan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera. 3. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara bidang dalam rangka menciptakan keterpaduan dalam mewujudkan pencapaian pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan program dan	1. Memanfaatkan letak geografis yang strategi aturan hukum, struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan adanya PLKB Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Bila dilihat dari kacamata Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang ataupun agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program KB,

keluarga berencana	kegiatan serta dukungan program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Penduduk, kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana	<p>dari yang dulu tidak peduli menjadi peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi aktif berperan serta, dan sebagainya. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB</p> <p>2. Dengan adanya kesempatan melakukan mitra kerja pusat, daerah dan organisasi terkait dan kesempatan mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga sehingga kelemahan (Weakness) dapat diakomodir agar dapat mencapai tujuan program dan kegiatan.</p>
WEAKNESS (KELEMAHAN)	STRATEGI WO	STRATEGI WT
<p>1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemberdayaan yang terbatas</p> <p>2. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai;</p> <p>3. Pendanaan dalam APBD kurang memadai</p> <p>4. Penguasaan IT daerah yang belum berfungsi</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemberdayaan yang terbatas, fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai dalam pelaksanaan pelayanan dan pendanaan yang kurang berakibat pada menurunnya tingkat pemenuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Serta belum maksimalnya penguasaan IT bagi SDM dan PLKB dalam melakukan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemberdayaan, meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja, penyediaan gedung dan peralatan dapat menubuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumberdaya</p>

secara maksimal	<p>input dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan. Kurangnya biaya gedung dan peralatan berefek kepada pelaksanaan pelayanan yang memerlukan tempat dan peralatan.</p> <p>2. Rendahnya tingkat partisipasi pria dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>3. Rendahnya tingkat partisipasi pria dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p>	<p>aparatur penyelenggaraan pemerintah.</p> <p>2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas terutama pada penduduk miskin, daerah tertinggal memperkecil kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah</p>
<p>5. Penguasaan IT daerah yang belum berfungsi secara maksimal</p> <p>6. Penyediaan pembiayaan gedung dan peralatan yang masih kurang;</p> <p>7. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut ber- KB (khususnya pria)</p> <p>8. Masih kurangnya informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga</p> <p>9. Masih kurangnya pemuktahiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga</p> <p>10. Masih kurangnya pelatihan kader posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu-PAUD</p> <p>11. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader BKB trampil dalam memahami</p>	<p>4. Rendahnya tingkat partisipasi pria dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>5. Masih kurangnya informasi serta data mikrokependudukan dan keluarga,</p> <p>6. berakibat minimnya pemuktahiran, pengolahan dan menjadikan penyediaan data kependudukan dan keluarga menjadi tidak optimal. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan kader posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu-PAUD berpengaruh dalam tehnik pembinaan dan keterampilan ibu balita khususnya dalam menambah penghasilan keluarga melalui UPPKS sehingga dukungan program dan kegiatan dalam SKPD dapat menghasilkan kajian dan penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan.</p>	<p>Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan pemeratan yang belum merata dan terkonsentrasi di daerah perkotaan untuk menekan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru (<i>new-emerging diseases</i>) seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain (W2,3,4 ; T1)</p>

tehnik pembinaan 12. Masih kurangnya kemampuan bakat dan keterampilan ibu balita yang punya usaha dalam menambah penghasilan keluarga melalui UPPKS		
---	--	--

Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Palangka Raya menemukan beberapa tantangan, antara lain :

1. Belum dilaksanakannya hak dan kewajiban PNS sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun Good Governance;
2. Adanya pengaruh negatif globalisasi yang berdampak pada timbulnya penyakit sosial masyarakat seperti Sex Bebas, prostitusi, narkoba, yang dapat berpengaruh pada kinerja dan disiplin aparatur pemerintah;
3. Adanya kebijakan yang sering berubah-ubah, termasuk rektrukturisasi kelembagaan perangkat daerah.
4. Permasalahan kependudukan dalam konteks keluarga berencana masih belum menjadi permasalahan prioritas

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, antara lain :

- a. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik
- b. .Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik focal point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak
- c. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan.
- d. Belum tersedianya data terpisah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan, keluarga berencana;
- e. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya prosentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan kondom.
- f. Belum optimalnya penyuluhan KB (PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB masih tingginya prosentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.

3.1.1 Kesiapan SDM

- a. Jumlah SDM di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tergolong mencukupi, baik dalam jumlah personil perencana dan teknis serta dari segi kualitas dan produktivitas. Namun pada perkembangan dimasa mendatang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan;
- b. Kesiapan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas SKPD;
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya sudah memiliki kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh KB;

- d. Ketersediaan Tenaga penyuluh KB sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

3.1.2 Kesiapan Sarana dan Prasarana

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi;
- b. Masih perlu ditingkatkan penambahan sarana dan prasarana kerja, gedung kantor, termasuk sistem jaringan informasi (internet).

3.1.3 Koordinasi

- a. Masih lemahnya integrasi program, koordinasi perencanaan antar bidang maupun dengan instansi lain;
- b. Masih perlunya Sarana Jaringan Telekomunikasi (internet) guna mempermudah pelayanan atau penyebaran informasi kepada masyarakat sesuai dengan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- c. Koordinasi dengan masyarakat perlu dioptimalkan khususnya bagi kaum wanita guna peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3.1.4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- a. Masih lemahnya pemahaman dari masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal pentingnya keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- b. Masih lemahnya pemahaman perempuan dalam program peningkatan kualitas hidup;
- c. Masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KB dan pelayanan Kontrasepsi.

3.1.5 Data dan informasi

- a. Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung setiap program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya;

- b. Data dan informasi setiap program belum terorganisir dengan baik, dan perlu ditingkatkan agar lebih validitas

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2014 – 2018 terdapat dalam

Misi 1 yaitu : *“Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan Dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”*

Dan Misi 5, yaitu : *“Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya, Harmonis, Dinamis Dan Damai Berdasarkan Filosofi Huma Betang”.*

Visi : **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG”**

Misi 1. **Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Misi 5. **Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya, Harmonis, Dinamis dan Damai berdasarkan Filosofi Huma Betang**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kota Palangkaraya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Revitalisasi Program Keluarga Berencana	Mengendalikan pertumbuhan Penduduk & Meningkatkan Kesadaran Keluarga Berencana
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Indexs Kesetaraan Gender	Optimalisasi Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun kota menuju kota layak anak	Optimalisasi Keserasian Kebijakan Dalam Peningkatan kualitas Kehidupan Anak

- a. Berikut adalah analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tidak lanjut terhadap peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, baik di lingkungan strategis eksternal Kota Palangka Raya **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut terhadap Peran DISDALDUKKBP3A dilingkungan Strategis Eksternal di DISDALDUKKBP3A Kota Palangka Raya

Potensi	Permasalahan	Tindak lanjut
Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya pelaksanaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Program peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4. Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1. Perlu dilakukan Sosialisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan melindungi individu perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Masih belum optimalnya Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dan pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program Promosi Kesehatan	1. Perlu dilakukan Sosialisasi secara berkesinambungan dan terus menerus dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui

	ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat 5. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan institusi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja.
Bidang perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	<p>1. Belum optimalnya Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Belum Optimalnya peran P2TP2A dalam proses pengaduan kekerasan terhadap anak</p> <p>3. Belum optimalnya program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</p> <p>4. Belum optimalnya program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</p> <p>5. Belum optimalnya program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD</p>	Perlu dilakukan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meningkatkan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Bidang Pengendalian Penduduk	<p>1. Belum optimalnya pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB</p> <p>2. Belum optimalnya kegiatan Pengendalian penduduk dan</p>	1. Perlu dilakukan koordinasi untuk memperkuat kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan

	<p>informasi keluarga</p> <p>3. Belum optimalnya pemuktahiran data keluarga</p> <p>4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah; melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah;</p> <p>5. Belum optimalnya analisa data kependudukan dan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga);</p>	<p>program dan kegiatan pembangunan</p>
--	---	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028, Visi Kota Palangka Raya adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATA BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”.

Adapun yang dimaksud dengan "**Kota Pendidikan Berkualitas**" adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Kalimantan;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual;

4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan atmosfer pendidikan yang nyaman untuk semua orang.

Adapun yang dimaksud dengan "**Kota Jasa Berkualitas**" adalah:

1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi, teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau, serta kabupaten lainnya;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi kreatif.

Adapun yang dimaksud dengan "**Kota Pariwisata Berkualitas**" adalah :

1. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi pilihan bagi masyarakat berwisata;
3. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain dalam membuat paket wisata;
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka Raya (Kalimantan Tengah);
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan "**Tertata dan Berwawasan Lingkungan**" adalah :

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan;

3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Adapun yang dimaksud dengan **Masyarakat Sejahtera** adalah :

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah Kota Palangka Raya;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang;
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan;
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka;
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan **Falsafah Budaya Betang** adalah :

1. Budaya Betang mengandung nilai-nilai : peradaban (dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung belom-bahadat),kerukunan, toleransi, demokrasi, kesatriaan (membela petak danom),kepemimpinan dan kebersamaan diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya;
2. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik;
3. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing;
4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya;
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2013 – 2018 ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan Kota Palangka Raya selama lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelayanan jasa terhadap masyarakat;
3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan;
4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.

Misi Kota Palangka Raya dengan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dalam :

Misi 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kota Palangkaraya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Revitalisasi Program Keluarga Berencana	Mengendalikan pertumbuhan Penduduk & Meningkatkan Kesadaran Keluarga Berencana

Misi 5. Mewujudkan Masyarakat Berbudaya, Harmonis, Dinamis dan Damai berdasarkan Filosofi Huma Betang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender & Perlindungan Anak	1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan 2. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Meningkatkan indeks kesetaraan Gender 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun Kota Palangka Raya menuju Kota Layak	1. Optimalisasi Program Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan 2. Optimalisasi Keserasian

		Anak (KLA)	Kebijakan dalam Peningkatan kualitas kehidupan anak
--	--	------------	---

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga /Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Berdasarkan kesamaan tugas dan fungsi, maka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Visi

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga BKKBN mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**,

Untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yang diemban, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

b. Tujuan.

Tujuan BKKBN adalah “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas.”

c. Sasaran.

Sasaran Strategis BKKBN sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Visi

Visi Kementerian PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu **“Terwujudnya Kesenjangan Gender, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus diemban, yakni:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;

2. Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Tujuan

Rumusan Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

c. Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing :

Tujuan 1 : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2 : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3 : Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;

- b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

1. V I S I Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai tujuan yang ingin di capai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan VISI sebagai berikut :

”Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Penjelasan Makna Visi tersebut :

Makna dari visi tersebut diatas adalah bahwa sebagai salah satu SKPD yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

2. M I S I Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dn Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3A-PPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan 2 Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Tujuan 3 Meningkatnya Pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan 5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

2. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah *Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:*

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. Meningkatnya jumlah lembaga yang mampu menyusun PPRG (Rensponsif Gender)
- d. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
- f. Meningkatnya ketersediaan lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup;
- g. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak;
- h. Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak;
- i. Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak;
- j. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak;

Tujuan 2 Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah *meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:*

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan;

- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan;
- c. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
- d. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas

Tujuan 3 Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. *Meningkatnya pemenuhan hak anak*, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Tersedianya kebijakan yang memfasilitasi aspirasi anak;
 - c. Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
 - d. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - e. Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat.
2. *Meningkatnya perlindungan anak*, termasuk anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus;
 - c. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus;
 - d. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. *Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;*
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
2. *Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas, yang ditandai dengan :*
 - a. Terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif;
 - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;

Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :

1. *Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk;* melalui :
 - a. Meningkatnya Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk;
 - b. Meningkatnya jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk;
 - c. Ketersediaan data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan.
2. *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana,* yang ditandai dengan :
 - a. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan;
 - b. Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)

c. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

3. *Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera, yang ditandai dengan :*

- a. Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera;
- b. Meningkatnya jumlah SDM yang diberikan Bimbingan Teknis tentang Ketahanan Keluarga;
- c. Dan Meningkatnya jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga.

Interkoneksi ketiga Renstra tersebut diatas dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, diharapkan terjadinya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas serta koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya juga mencacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih, yaitu “**TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA, PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**” sesuai dengan filosofi huma betang. Jika ditelaah lebih lanjut visi sekaligus misi kepala dan wakil kepala daerah mengarah pada perwujudan destinasi pariwisata yang legal dengan didukung pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai penggerak roda pembangunan dan perekonomian dikarenakan semakin tinggi masyarakat yang sejahtera semakin berkurangnya tingkat pengangguran serta meningkatkan kedudukan dan peran perempuan disegala bidang kehidupan dan pembangunan sesuai dengan sasaran kegiatan, program dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tidak lepas dari peran serta masyarakat, yang terdapat faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra antara lain :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Belum terciptanya sinergitas masyarakat dengan program peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pegasusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	1. Strategi pengembangan setiap program Pemberdayaan dan Keluarga Berencana dengan melakukan promosi yang didukung oleh berbagai pihak yang berkompeten.
2. Belum adanya kesadaran masyarakat pada setiap program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi, Peran serta	2. Terdapatnya banyak institusi /lembaga yang berperan dibidang pengembangan pemberdayaan perempuan dalam segi kemandirian dan pemberdayaan kerja perempuan yang dilakukan guna memberikan usaha dalam

<p>masayarakat KB/KR yang mandiri, Promosi kesehatan Ibu, bayi, dan anak, Peningkatan penganggulungan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS</p> <p>3. Belum maksimalnya pelaksanaan program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak malalui kelompok kegiatan masyarakat, pengembangan pusat pelayanan informasi dan korseling KRR, Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD, program kesehatan reprodksi remaja.</p> <p>4. Belum optimalnya informasi dan analisis data, salah satunya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program pengembangan bahan informasi tentang pangasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, program pemuktahiran data keluarga.</p>	<p>pengembangan peningkatan kualitas perempuan dalam bidang kehidupan pembangunan.</p> <p>3. Terdapatnya pendukung lain yaitu intansi BPP-KB yang memiliki 25 PPL-KB yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4. Terdapat peran PKK dan Posyandu dimasing-masing kelurahan sebagai pembantu pelaksananan setiap program keluarga berencana</p>
--	---

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya tentunya sangat berpengaruh oleh dinamika perekonomian, pertumbuhan penduduk, kesehatan, tingkat kesejahteraan Kota, Provinsi dan Nasional sehingga berdasarkan kondisi tersebut terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang sangat mempengaruhi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2018. Maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya menentukan beberapa isu strategis, antara lain :

1. Merangkul para kelompok/himpunan masyarakat pendiri penggerak perempuan dalam peningkatan peran perempuan sehingga dapat mendukung kualitas hidup dengan mengetahui pekerja perempuan hingga jumlah perempuan korban KDRT se Kota Palangka Raya;
2. Meningkatkan peran serta perempuan dalam setiap kebijakan guna meningkatkan kualitas anak dan perempuan;
3. Perlunya kebijakan pimpinan dalam membuat sistem database untuk informasi dan analisa data yang lengkap mengenai Data Keluarga guna mengetahui pasangan usia subur agar dipilah menjadi prevalansi peserta KB Aktif sehingga dapat diketahui jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera dan Sejahtera;
4. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi ibu dan peningkatan pengembangan tumbuh kembang bayi dan anak.;
5. Peningkatan pelayanan dalam pembinaan, promosi, konseling dan pemuktahiran data keluarga;
6. Peningkatan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) kepada remaja di sekolah-sekolah;
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Organisasi agar menjadi profesional;
8. Kuantitas dan kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi yang memadai;
9. Pengembangan SDM yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya persentase perempuan dalam jabatan publik
11. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan perlindungan anak, baik focal point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak
12. Masalah Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, maupun tempat umum. Kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan

13. Belum tersediannya data terpisah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan
14. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB.
Hal ini ditandai masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan kondom

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi SKPD yang mengacu pada Visi Walikota Palangka Raya dan melaksanakan misi, karena tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan
- b. Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang
- c. Meningkatnya pelayanan dan jumlah akseptor KB;
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
- e. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- f. Meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sasaran kegiatan, program dan kebijaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2018 adalah :

- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana DISDALDUKKBP3A
- b. Menurunnya laju pertumbuhan Penduduk
- c. Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap
- d. Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB,BKR,BKL) dan kelompok UPPKS
- e. Terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Terwujudnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan

- g. Meningkatkan komitmen SKPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender
- h. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan disegala bidang kehidupan dan pembangunan.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Rumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya urusan tersebut antara lain :

Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan urusan Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak dan Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah :

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- f. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, anak serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan Bidang Keluarga Berencana adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan :

- a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi

pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisiensi untuk jangka panjang.

- b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera -1, peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Indikasi rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka berisi program-program dan kegiatan untuk pemenuhan layanan SOPD dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan. Program-program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SOPD.

Pada masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja (*outcome*) dan masing-masing kegiatan dilengkapi dengan target indikator kinerja (*output*), untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif secara terinci dapat dilihat pada **Tabel 5.1**

- 1) ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- m) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- n) Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
- 2) ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Perbaikan dan Rehab Gedung Kantor
- 3) ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4) ***Program peningkatan disiplin aparatur***
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 5) ***Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan***
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan
 - b. Penyusunan program dan rencana kerja
 - c. Penyusunan pelaporan Penyuluh KB penilai dan penetapan angka kredit sementara
 - d. Penata Usahaan Aset
- 6) ***Program Keluarga Berencana***
 - a. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - b. Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari
 - c. Rapat Koordinasi Program KB
 - d. Pengadaan Sarana Kerja RPKBD/Sub PPKBD (DAK)
 - e. Pengadaan Personal Computer (PC) untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang Alkom (DAK)
 - f. Pengadaan BKB Kit (DAK)
 - g. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOB) (DAK)
 - h. Pengadaan Genre Kit (DAK)
 - i. Pembinaan dan Pelayanan KB secara terpadu dengan Institusi terkait
 - j. Peningkatan dan Pembinaan Program KB pada Penyuluh KB dan Kampung KB
 - k. Sosialisasi Pemantapan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi JKK Tingkat Kota Palangka Raya
 - l. Bimbingan Teknis Pelayanan KB
 - m. Sosialisasi tentang Pengayoman medis terhadap peserta KB
 - n. Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat Kota Palangka Raya

- o. Pengadaan Kartu Kembang Anak (DAK)
- p. Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK)
- q. Pengadaan LCD untuk Balai Penyuluh KB (DAK)
- r. Pengadaan BKL KIT (DAK)
- s. Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klinik KB
- t. Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/ Alkon di fasilitas kesehatan klinik KB

7) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- a. Peningkatan Pengetahuan tentang kesehatan Reproduksi bagi remaja
- b. Lomba Rap Tingkat Kota Palangka Raya
- c. Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular Seksual pada Remaja dalam rangka bulan peduli kespro

8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

- a. Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Kelompok BKB,BKR,BKL,PPKB dan Sub.PPKBD)
- b. Memperkuat Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Melalui Lomba Peringatan HARGANAS
- c. Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- d. Lomba Ajang Kreatifitas Remaja
- e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)(DAU)

9) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

- a. Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk
- b. Penguatan Kelembagaan KB melalui Bimtek kepada PKB/PLKB Badan/Paramedis
- c. Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2017
- d. Pembuatan Grand Desain Kependudukan TK, Kota Palangka Raya
- e. Pembinaan Kampung KB

10) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

- a. Pembinaan peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
- b. Peningkatan Tim Penggerak PKK
- c. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

- d. Pendidikan Ketrampilan
- e. Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan
- f. Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan
- g. Peranan Posyandu
- h. Pembinaan dan Koordinasi Pokjanal Posyandu

11) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

- a. Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- b. Pembinaan dan Pengembangan P2TP2A (Membangun Kapasitas Petugas Penerima Pengaduan dalam Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pelatihan Wawancara (Screening))

12) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

- a. Kegiatan Advokasi dan Penguatan Kelembagaan PUG

13) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- a. Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan

14) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

- a. Pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) Kota Layak Anak (DAU)
- b. Kegiatan Pelatihan bagi aktivis/kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

15) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- a. Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional

Adapun penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lebih jelas, akan dijabarkan dalam Matrik program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan indikatif kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (2013-2018) disajikan dalam **Tabel 5.1 (Lampiran)**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mencerminkan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya menjadi sesuatu yang konkrit dan dapat diukur, diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, disajikan dalam **Tabel 6.1 (Lampiran)**

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran kebijakan serta pembangunan. Pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan memasuki pada tahun ke – 4 dalam pelaksanaan rencana jangka menengah dimana digunakan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 ini. Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan periode tahun 2013-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.